

## H. Daftar Pustaka

### Buku :

- Adjie, Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly, *Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Majalah Renvoi, Jakarta, 2003.
- Basah, Sjachran, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Libery, Yogyakarta, 2015.
- Budiono, Herlin *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2022.
- Doddy Radjasa, Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*, Media Notaris, Tangerang, 2005.
- Donner, A.M *Penerapan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.
- Gautama Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Alumni, 1973.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Harahap M, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982.
- Harsono, Boedi *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan dan Isi Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2008.

- Hartanti Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tertentu*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013.
- Hatta Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 1999.
- I Gusti Nyoman, *Pendaftaran Tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014.
- Ida Bagus, Wiyasa Putra, *Hukum Tanah di Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2003.
- Kansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kelsen, Hans, *Teori- Teori Hukum Murni*, A.S Publishing, Makkasar, 1989.
- Kusumawati, Azhari Siti, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2006.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Perdata*, Liberty, Jogjakarta, 1981.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Pada Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mulyadi, Lilik *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2007.
- Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Pramodya Puspa Van, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1973.
- Prasetyo, Teguh, *Filsafat Teori Ilmu Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1986.
- Puspa Van, Pramodya , *Kamus Ilmu Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Roestamy, Martin, *Perkembangan Hukum Properti Indonesia*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2017.
- Ronny, Hanitijo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum dan Yutimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumi, Bandung, 1992.
- Simun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Soerodjo, Irawan *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003.
- Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan dan Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sumardjono, Maria S.W. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Suparman Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Saudara, Serang, 1992.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tobing, G.H.S., Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Wantjilk Saleh. K, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.

**Jurnal :**

- Adolf, Jozan, “Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta”, *Jurnal Notarius*, Volume. 13 Nomor. 1, 2020, hlm. 2-8.
- Andrew Hutchison & Dale Hutchison, *The South African Law Journal* “Simulated Transactions And The Fraus Legis Doctrine”, Volume. 131 Nomor. 1, 2014, hlm. 69-70.
- Asnawi, M. Natsir, “Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia”, *Jurnal UII Press*, Volume. 2, Nomor. 3, 2022, hlm. 30-31.
- Astria Nurwinda Sari, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Oleh Pengadilan”, *Jurnal Education and Development*, Volume. 11 Nomor. 1, 2023, hlm. 248-260.
- Desvia Winandra dan Hanafi Tanawijaya, “Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Lbt)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume. 3 Nomor.2, 2020, hlm.5-10.
- Fauzieq, “Efek Dari Dynamic Compaction Terhadap Peningkatan Kuat Geser Tanah” *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, Volume. 1, Nomor.2, 2018, hlm. 206-208.
- Fredik Mayore Saranaung, Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, *Jurnal Lex Crimen*, Volume.4, Nomor.1, 2017, hlm. 16.
- Hadisiswati, Indri, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah”, *Jurnal Akham*, Volume.2 Nomor.1, 2014, hlm. 15-19.
- Hartanto, Andy, ”Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah” *Jurnal Laksbang Justitia*, Surabaya, Volume.2 Nomor.4, 2015, hlm. 21-119.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertipikat”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 24, Nomor.3, 2017, hlm. 470-480.
- Hayati, Nur, “Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah”, *Lex Jurnalica*, Jakarta, Volume.13 Nomor.3, 2011, hlm. 3-9.
- Hilmi Latifah “Precautionary Principle Sebagai Landasan Dan Merumuskan Kebijakan Publik” *Jurnal Yustitia*, Volume. 5, Nomor.2, 2016, hlm. 276-278.

- Iftitah Isnania, Nur, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", Jakarta, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume.2 Nomor.2, 2017, hlm. 17-20.
- Nurokhim, "Perlindungan Hukum atas Tanah", Denpasar Bali, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume.2, Nomor.2, 2017, hlm. 20-29.
- Priatno, Agung, "Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanggung Jawab Notaris", *Jurnal Sentri*, Volume. 2, Nomor.3, 2024, hlm. 3-10.
- Rahmad Hendra, "Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 2 Nomor. 2, 2012, hlm. 2-18.
- Raskita Subakti, "Analisis Hukum Penggunaan Surat Kuasa Yang Melebihi Tujuannya", *Jurnal HKBP Nommensen*, Volume.3 Nomor.1, 2022, hlm. 16-30.
- Scott C. Idleman, "A Prudential Theory of Judicial Candor", *Faculy Publication of Marquette University Law School*, Paper 181, terjemahan bebas oleh Yeni Herm Waty, 2005, hlm. 13-96.
- Smith, Adam "The Theory Of Moral Sentimens Indianapolis", *Oxford University Press*, 1976, hlm. 1-153.
- Sri Wartini, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Sanitary And Phytosanitary Agreement, Studi Kasus: Keputusan Appelatte Body WT Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum*, Volume.14 Nomor.2, 2007, hlm. 301-309.
- Swardhana, Made, " Kebijakan Pemerintah dalam Mengantisipasi Praktek Nominee Dibidang Pertanahan di Bali" , *Jurnal Udayana* Volume.2 Nomor. 3, 2007, hlm. 4-10.
- Wantu, Fence M., "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", Gorontalo: *Jurnal Dinamika Hukum* Volume.12 Nomor.3, 2012, hlm. 1-481.
- Wartini, Sri, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Sanitary And Phytosanitary Agreement", Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat, *Jurnal Hukum*, Volume.14 No.2, 2017, hlm. 12-16.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan Niaga” Jakarta *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume.12, Nomor.2, 2014, hlm. 219-222.

#### **Tesis/Disertasi :**

Adha Rizka, Anastasia *Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam kaitannya dengan Kuasa Mutlak di Kotamadya Bekasi*, Program Studi Magister Kenotariatan, Tesis, Universitas Nusa Mandiri, 2003.

Lumban Gaon, Selamat, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Dibawah Tangan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Tesis, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018.

Muhammad, Abdulkadir, *Suatu Pengkajian Informasi Tertulis Mengenai Hukum yang berasal dari berbagai sumber Hukum dan Penelitian Hukum*, Program Studi Magister Kenotariatan, Tesis, Universitas Medan Area, 2014.

Wijaya, Dony, *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik*, Program Studi Magister Kenotariatan, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2015.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilai Pertanahan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

**Putusan :**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 149/PDT/2021/PT DPS.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4223 K/Pdt/2022.

